



EVALUASI PENYELENGGARAAN REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018

PENDAHULUAN

Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan momen penting dalam pemenuhan pegawai guna mendapatkan kader terbaik bagi birokrasi pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Tidak dipungkiri Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pangsa pasar

lapangan kerja yang banyak dibidik oleh masyarakat angkatan kerja produktif bagi lulusan Perguruan Tinggi *fresh graduate*. Rekrutmen CPNS dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang ideal, oleh karena itu setiap instansi pemerintah perlu menyusun kebutuhan PNS secara rasional berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dalam hal penerimaan CPNS, pemerintah di tahun 2018 menetapkan 238.051 formasi yang diperuntukan bagi instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah. Tercatat sebanyak 4.436.694 pelamar yang melakukan pendaftaran, sementara itu sebanyak 3.782.685 yang sudah memilih Instansi, dan sebanyak 3.627.981 pendaftar yang sudah melakukan submit data melalui situs resmi www.sscn.bkn.go.id.

Ringkasan Eksekutif

- Pengadaan CPNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan CPNS, masa percobaan, dan pengangkatan PNS.
- Permasalahan teknis dalam penyelenggaraan seleksi CPNS terkait perencanaan, persiapan, waktu, koordinasi, dan panitia seleksi.
- Seleksi pengadaan CPNS dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap; seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang.
- Kegiatan monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana seleksi CPNS berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

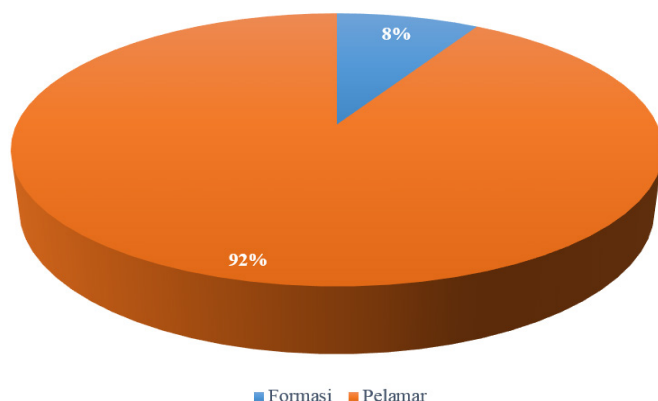
Banyaknya peserta seleksi CPNS menunjukkan bahwa bekerja di sektor pemerintahan merupakan profesi favorit bagi masyarakat di Indonesia secara umum. Tujuan diadakannya seleksi CPNS untuk mencetak sumberdaya PNS aparatur negara yang kompeten, bermartabat, profesional, dan berintegritas. Hal ini sebagaimana pendapat Nitisemito (1996:36) bahwa tujuan dilaksanakan proses seleksi adalah untuk mendapatkan pegawai yang tepat *the right man in the right place*. Dalam proses seleksi menurutnya harus bisa mendapatkan tenaga kerja yang tepat dalam posisi yang tepat pula. Pendapat ini menginspirasi bahwa di sektor pemerintahan dalam pengadaan dan rekrutmen CPNS perlu dilaksanakan secara ketat, selektif, dan transparan sehingga siapa saja yang mengikuti dan berkesempatan menjadi CPNS sangat terbuka lebar.

Memperhatikan pelaksanaan proses seleksi CPNS tahun 2018 banyak terdapat beberapa

Penulis : Afifah Ayumi
Penanggungjawab : Achmad Slamet Hidayat
Pimpinan Redaksi : Ajib Rakhmawanto
Editor : Arina Tanya Asianti
Design Grafis : Santosa
Sekretariat : Heri Noviyanto
Sirkulasi : Hamid Munawan
Alamat : Jl. Letjend Sutoyo No.12 Cililitan,
Jakarta Timur
Telp/e-mail : 021-80887011/puslitbang_bkn@yahoo.com

kendala yang perlu dikritisi sebagai perbaikan seleksi CPNS di tahun-tahun berikutnya. Beberapa kendala tersebut seperti; kepanitiaan, perencanaan, *server*, skor nilai, penetapan *passing grade* dan *ranking*, kerjasama antar instansi, dan lain sebagainya. Semua ini perlu adanya koreksi guna memberikan pelayanan publik yang baik dalam hal seleksi CPNS sesuai standar pelayanan publik. Disamping itu juga pada infra struktur fisik yang belum memadai seperti perangkat komputer dan jaringan yang minim jangkauan teknologi, serta pendaftaran *online* disitus web www.sscn.bkn.go.id yang kerap kali mengalami *maintenance*. Kemudian adanya ketidakkonsistenan sistem atau ketentuan serta kualifikasi yang diinformasikan pada saat dibukanya rekrutmen CPNS tahun 2018. Pelaksanaan seleksi CPNS juga perlu memperhatikan ketentuan praturun perundang undangan yang ada dan berbagai kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Memperhatikan hal ini apakah dalam proses rekrutmen CPNS di tahun 2018 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil?

Diagram Persentase Kebutuhan Formasi dan Pelamar



Penyelenggaraan Seleksi CPNS Tahun 2018

Permasalahan teknis dalam penyelenggaraan seleksi CPNS terkait perencanaan, persiapan, waktu, koordinasi, dan panitia seleksi. Hal ini menimbulkan persepsi kurang positif yang terjadi dalam masyarakat berkaitan *image* pelayanan publik (seleksi CPNS) yang terkesan belum maksimal, dimana beberapa instansi masih

terkendala dengan infrastruktur dan komponen fasilitas penyelenggaraan seleksi *Computer Assisted Test (CAT)*. Di Yogyakarta pemerintah menunda tes seleksi CPNS akibat sarana komputer yang tidak tercukupi, dari 2000 peserta yang akan mengikuti tes *Computer Assisted Test (CAT)* hanya 240 unit komputer yang disediakan oleh panitia penyelenggara, namun demikian dapat diatasi komputer tambahan yang disediakan baru tiba di lokasi satu hari sebelum pelaksanaan ujian CAT (Mustaqim, 2018:26). Permasalahan infrasturuktur lainnya berasal dari *server*, hal ini dapat dilihat dari postingan pendaftar di akun resmi twitter BKN, dimana beberapa pendaftar mengalami kesulitan saat mengakses *website* yang beberapa kali mengalami *down server* sehingga proses pendaftaran akun membutuhkan tambahan periode waktu pendaftaran.

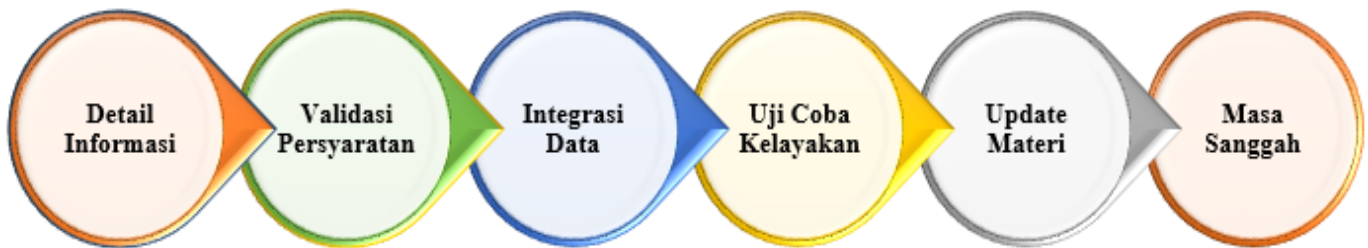
Permasalahan teknis lainnya berasal dari ketetapan persyaratan administrasi yang tidak konsisten seperti yang dialami oleh salah satu peserta CPNS 2018 di Kementerian Kesehatan dengan jabatan Dokter umum. Salah satu persyaratan wajib untuk melamar jabatan Dokter adalah tersedianya surat ijin praktik yang sah namun tidak ada keterangan spesifikasi khusus surat ijin praktik yang harus dilampirkan sehingga pelamar melampirkan surat ijin praktik magang saat melamar jabatan tersebut, akhirnya dapat mengikuti proses seleksi administrasi, CAT, hingga pemberkasan. Namun yang terjadi setelah pemberkasan peserta tersebut mendapatkan status TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dikarenakan surat ijin praktik saat melamar tidak berlaku yaitu surat ijin praktik magang, sementara dokumen yang butuhkan adalah surat ijin praktik non magang. Hal ini menimbulkan kekecewaan terhadap sejumlah peserta yang sudah berhasil lolos tahap ujian *Computer Assisted Tes (CAT)* dari segi pelayanan serta proses perekrutan, apabila spesifikasi dokumen tidak memenuhi syarat seharusnya ditegaskan sejak awal dan tidak lulus seleksi administratif. Masalah lain terdapat ketidaksesuaian proses seleksi CPNS saat tahap seleksi administrasi, adanya ketidakjelasan penentuan istilah rumpun keilmuan, sehingga peserta yang seharusnya memenuhi syarat sesuai formasi (Rachman, dan Aprialdo. 2018:1) yang dibutuhkan menjadi tidak diloloskan.

PEMBENAHAN SELEKSI CPNS

Dalam setiap program kegiatan monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana program berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Demikian juga dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2018, evaluasi

dilaksanakan untuk perbaikan ditahun berikutnya. Evaluasi sebagai pembenahan yang dapat dilakukan dari penyelenggaraan seleksi CPNS tahun 2018 diantaranya sebagaimana tertera dalam gambar berikut:

Proses pra seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil



1. Detail informasi.
Informasi yang disampaikan harus tertulis serinci mungkin khususnya untuk persyaratan formasi yang memiliki sertifikasi khusus seperti tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Hal ini untuk meminimalisir kasus TMS saat pemberkasan yang sebenarnya peserta tersebut memiliki potensi yang tinggi dan dikenakan status TMS hanya karena kekeliruan informasi dokumen yang tidak dijabarkan secara rinci diawal pengumuman.
2. Review dan validasi persyaratan.
Setiap instansi memiliki syarat dokumen yang bervariasi. Sebagai contoh instansi Kementerian Kesehatan tentunya memiliki kebijakan persyaratan berbeda dibandingkan Kementerian Luar negeri. Kurang lebih 500 instansi yang mempersyaratkan dokumen yang bervariasi sehingga besar kemungkinan adanya persyaratan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu sebelum pelaksanaan seleksi dilaksanakan, persyaratan dan ketentuan yang sudah diterbitkan oleh masing-masing instansi harus direview dan divalidasi terlebih dahulu.
3. Memaksimalkan fungsi integrasi data
Pada dasarnya antar instansi penyelenggara SSCN khususnya Badan Kepegawaian Negara dan instansi penyedia data khusus seperti sertifikasi tenaga ahli sudah terintegrasi, namun sistem informasi yang tersedia belum memaksimalkan fungsi data terintegrasi tersebut untuk me-nonaktifkan fungsi sistem apabila peserta menginputkan nomor sertifikasi yang tidak terdaftar sehingga peserta yang telah terdeteksi sistem tidak memenuhi kriteria, tidak dapat mengisi data lainnya dan kolom inputan data lainnya secara otomatis terkunci sehingga indikasi status TMS(Tidak memenuhi Syarat) disaat pemberkasan akhir dapat terminimalisir.
4. Uji kelayakan infrastruktur.
Sebelum pendaftaran dan ujian CAT diselenggarakan, sebaiknya tiap instansi berkordinasi dengan Panselnas melakukan uji kelayakan infrastruktur dan soal-soal CAT paling tidak 2 minggu sebelum diselenggarakan. Dengan demikian masih ada waktu yang diperlukan untuk pembenahan infrastruktur maupun soal-soal ujian yang bermasalah.
5. Update materi ujian.
Update materi ujian secara berkala harus menjadi perhatian penyelenggara, hal ini sangat dirasakan oleh beberapa formasi atau jabatan salah satunya formasi Pranata Komputer. Teknologi berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman, oleh karenanya materi soal perlu disesuaikan pada kondisi saat ini.
6. Pemberian masa sanggah seleksi administrasi dari beberapa keluhan pendaftar SSCN 2018, yaitu pada saat pengumuman seleksi administrasi, beberapa pendaftar yang tidak lulus

seleksi administrasi kecewa karena alasan tidak lulus administrasi tidak sesuai dengan realita yang ada, seperti contoh; pendaftar tidak lulus karena kapasitas dokumen terlalu besar, padahal saat melakukan submit pendaftaran tidak ada pemberitahuan bahwa file yang di upload tidak memenuhi persyaratan dan dari sisi pendaftar pun dapat memastikan bahwa file tersebut memiliki kapasitas yang sesuai dengan persyaratan. bisa jadi hal ini disebabkan oleh *human error verifikator* untuk itu mada sanggah ini sangat bermanfaat untuk peserta yang merasa tidak melakukan kesalahan saat seleksi administrasi.

PENUTUP

Pembenahan dan evaluasi penyelenggaraan seleksi CPNS dilakukan agar pelaksanaan seleksi CPNS dapat berjalan lebih baik dan profesional. Perbaikan manajemen seleksi CPNS dari perencanaan hingga tujuan dianalisis ulang agar lebih efektif. Seleksi CPNS yang transparan dan akuntabel merupakan amanat reformasi birokrasi untuk menciptakan PNS yang handal, kompeten, kompetitif, dan punya daya saing global. Penerapan sistem manajemen PNS yang belum mampu mendorong peningkatan kualitas PNS, perlu ditata ulang, dimonitring, dan dievaluasi untuk menciptakan eektivitas dan efisiensi organisasi pemerintah. Penguatan terhadap sistem manajemen seleksi CPNS dilakukan secara konsisten agar mampu mendorong perubahan profesionalisme penyedia PNS dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah. Peninjauan kembali terhadap sistem rekrutmen dan seleksi CPNS mempertimbangkan pentingnya koordinasi antar instansi pemerintah. Seluruh ketentuan dan persyaratan rekrutmen dan seleksi CPNS perlu divalidasi untuk perbaikan. Peningkatan peran stakeholder diperlukan guna memberikan pertimbangan-pertimbangan khusus, yang dapat mendorong terciptanya penyelenggaraan seleksi yang efektif, objektif, transparan dan tepat sasaran.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Semua persyaratan dokumen divalidasi oleh Panselnas sebelum di umumkan ke masyarakat

Adanya masa sanggah setelah proses pendaftaran online melalui situs resmi sccn.bkn.go.id.

Persyaratan pendidikan perlu mendapat pertimbangan terlebih dahulu guna meminimalisir kesalahan yang bersifat subyektif

Memutakhirkan soal-soal ujian CAT CPNS melalui uji validitas dan uji reabilitas

Persyaratan dituliskan secara rinci dan jelas, pada formasi yang membutuhkan keahlian khusus.

DAFTAR PUSAKA

- Widyanuratikah, Inas dan Hafil, Muhammad. 2018. Jumlah Pendaftar CPNS 2018 Terbanyak Sepanjang Sejarah. <https://www.republika.co.id/berita/pgpyhz430/jumlah-pendaftar-cpns-2018-terbanyak-sepanjang-sejarah> (diakses 27 Juni 2019).
- Ningrum, Magdalena Praharani Surya. 2016. Kriteria Dalam Menyeleksi Pegawai. <http://magdalena14030ft.blogspot.com/2016/03/mind-mapp-kriteria-dalam-menyeleksi.html> (diakses 27 Juni 2019).
- Arnani, Mela. 2018. Tes Seleksi Kompetensi Dasar CPNS di Yogyakarta Diunduh. <https://regional.kompas.com/read/2018/10/26/13230921/tes-seleksi-kompetensi-dasar-cpns-di-yogyakarta-diunduh?page=all> (diakses 27 Juni 2019).
- Rachman, Dylan Aprialdo. 2018. Ombudsman Terima 1.054 Laporan Masyarakat Terkait Persoalan Seleksi CPNS 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/03/12462961/ombudsman-terima-1054-laporan-masyarakat-terkait-persoalan-seleksi-cpns-2018>. (diakses 27 Juni 2019).
- Republik Indonesia. 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5038. Jakarta: Sekretariat Negara.